KATA PENGANTAR

Puji syukur kita panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas selesainya Pengukuran Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat Kabupaten Bulukumba T ahun 2023. Dalam rangka memenuhi kebutuhan pemerintah dalam mengukur Indikator Kinerja Kunci (IKK) urusan Perpustakaan sesuai dengan Peraturan Kementerian Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

Pengukuran Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat ini akan menjadi sistem nasional yang bukan hanya untuk menjawab Indikator Kinerja Kunci Urusan Perpustakaan saja, tetapi sebagai dasar penyusunan program pengembangan dan pembinaan perpustakaan di Kabupaten Bulukumba, strategi pengembangan perpustakaan, dan dasar penyusunan arah kebijakan perpustakaan. Selain itu, skor Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat yang dihasilkan diharapkan dapat memberikan potret fenomena perkembangan dan pelaksanaan pembinaan semua jenis perpustakaan Kabupaten Bulukumba.

 Dinas Kearsipan dan Perpustakaan DaerahKabupaten Bulukumba sebagai lembaga pembina semua jenis perpustakaan di daerah menjadikan nilai Pengukuran Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat tersebut dasar pemetaan terkait kondisi semua jenis perpustakaan yang nantinya akan berpengaruh dengan berbagai kebijakan dan program nasional yang akan dilakukan oleh Perpustakaan.

 Akhir kata, terima kasih dan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada semua pihak yang akan menjadi bagian dari pengukuran Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat ini.

Bulukumba, Desember 2023

KEPALA DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN DAERAH KABUPATEN BULUKUMBA,

 **EMILYUSRI,SP,MP**

 Pangkat:Pembina Utama Muda

 NIP. 19700705 199903 1 005

**DAFTAR ISI**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Pengantar | ……………………………………………………………………… | i |
| Daftar Isi | ………………………………………………………………………… | ii |
| BAB I | Pendahuluan…………………………………………………… | 1 |
|  | Latar Belakang…………………………………………………….. | 1 |
|  | Maksud dan Tujuan……………………………………………….. | 2 |
| BAB II | Indeks Pembamgunan Literasi Masyarakat……….. | 4 |
|  | Defenisi……………………………………………………………… | 4 |
|  | Tingkatan Skor Indeks Pembangunan Literasi masyarakat. …… | 6 |
|  | Sinkronisasi Data……………………………………………………. | 6 |
| BAB III | Capaian Indeks Pembangunan Litrasi Kabupaten Bulukumba Tahun 2023……………………………………………………….. | 7 |
| BAB IV | Penutup…………………………………………………………….Kesimpuilan………………………………………………………..Saran………………………………………………………………. | 111112 |
| Lampiran |  |  |

**BAB I**

**PENDAHULUAN**

1. Latar Belakang

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan menyebutkan bahwa perpustakaan berfungsi sebagai wahana pendidikan, penelitian, pelestarian, informasi, dan rekreasi untuk meningkatkan kecerdasan dan keberdayaan bangsa, dengan tujuan memberikan layanan kepada pemustaka, meningkatkan kegemaran membaca, serta memperluas wawasan dan pengetahuan untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. Dalam konteks inilah maka perpustakaan menjadi hak dimana masyarakat mempunyai hak yang sama untuk memperoleh layanan serta memanfaatkan dan mendayagunakan fasilitas perpustakaan dalam peningkatan kualitas hidupnya.

Dalam melaksanakan tugas pemerintahan dalam bidang perpustakaan, Perpustakaan Nasional RI memiliki fungsi sebagai perpustakaan pembina semua jenis perpustakaan di Indonesia (perpustakaan umum, perpustakaan sekolah, perpustakaan perguruan tinggi, perpustakaan khusus), perpustakaan rujukan, perpustakaan deposit, perpustakaan penelitian, perpustakaan pelestarian dan pusat jejaring perpustakaan di Indonesia.

Seiring diberlakukannya Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah dan Peraturan Pemerintah No. 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, Perpustakaan menjadi urusan wajib tidak berkaitan dengan kebutuhan dasar. Artinya, pembangunan perpustakaan telah menjadi urusan pemerintah daerah. Oleh sebab itu, Perpustakaan Nasional RI berupaya untuk mempertajam pengembangan dan pembinaan perpustakaan agar dampak yang dirasakan semakin lebih terasa dan bermanfaat bagi masyarakat.

Dalam pasal 1 ayat 5 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah disebutkan bahwa Indikator Kinerja Kunci yang selanjutnya disingkat IKK adalah indikator kinerja yang menggambarkan keberhasilan penyelenggaraan suatu urusan pemerintahan. Dengan demikian bahwa tiap pemerintah daerah berkewajiban menyerahkan hasil Pengukuran Indikator Kinerja Kunci Urusan-Urusan Pemerintahan termasuk dalam hal ini Bidang Perpustakaan ke Pemerintah Pusat (Kementerian Dalam Negeri).

Salah satu Indikator Kinerja Kunci Bidang Perpustakaan yang harus dilaporkan adalah Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat (IPLM). Pemerintah dalam Rencana Strategis Perpustakaan Nasional Republik Indonesia Tahun 2020-2024 memuat sasaran strategis Perpustakaan Nasional RI 2020-2024 yaitu: “Terwujudnya Pembangunan Literasi dan Kegemaran Membaca Masyarakat ditandai dengan meningkatnya indeks pembangunan literasi dan kegemaran membaca”. Indikator yang ingin dicapai indeks pembangunan literasi masyarakat dari 12,93 (baseline 2020) menjadi 15,00 pada tahun 2024

1. **Maksud dan Tujuan**

Kegiatan Kajian Indeks Pembangunan Literasi Masyarakata Tahun 2023 dimaksudkan untuk mengetahui kondisi tiap unsur pembangun literasi dan sebagai rujukan bagi pemerintah daerah dalam menyusun laporan evaluasi penyelenggaraan pemerintah daerah bidang perpustakaan. Adapun tujuan dari kegiatan indeks pembangunan literasi masyarakat tahun 20223 antara lain:

1. Mengetahui pemerataan layanan perpustakaan., sebaran perpustakaan serta potensi seluruh jenis perpustakaan di Indonesia baik perpustakaan umum, perpustakaan perguruan tinggi, perpustakaan sekolah dan perpustakaan khusus, diantaranya gedung, infrastuktur IT, anggaran dan regulasi daerah sehingga tergambar , rasio perpustakaan dengan penduduk perkapita dan rasio sebaran perpustakaan wilayah..

2. Mengetahui ketercukupan koleksi perpustakaan seluruh jenis perpustakaan, diantaranya jumlah koleksi (judul dan eksamplar buku), judul kioleksi digital/e-resources. koleksi berkala yang dilanggan, sirkulasi perbulan dalam 1 tahun dan anggaran pengadaan koleksi sehingga tergambar rasio perpustakaan dengan penduduk perkapita dan rasio penduduk.

3. Mengetahui SDM/Tenaga Perpustakaan pada semua jenis perpustakaan diantaranya jumlah SDM, kualifikasi SDM, jumlah pustakawan, jumlah pustakawan bersertifikasi, jumlah tenaga bersertifkasi, jumlah SDM bersertfikasi sehingga tergambar rasio penduduk dengan tenaga perpustakaan

4. Mengetahui pengunjung semua jenis perpustakaan diantaranya jumlah anggota perpustakaan, profil pemustaka (jenis kelamin, pekerjaan), jam layanan perpustakaan dan jumlah kunjungan perbulan/tahun sehingga tergambar rasio penduduk /pemanfaatan perpustakaan berbasis

5. Mengetahui kondisi perpustakaan yang dibina sesuai

6. Mengetahui tingkat keterlibatan masyarakat dalam kegiatan sosialisasi dibidang perpustakaan.

7. Mengetahui perkembangan jumlah anggota perpustakaan di se luruh Indonesia.

**BAB II**

**INDEKS PEMBANGUNAN LITERASI MASYARAKAT**

1. Definisi

Pengertian Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat (IPLM) adalah konsep yang digunakan untuk mengukur tingkat literasi atau kemampuan membaca dan menulis masyarakat dalam suatu wilayah. Secara etimologi maupun terminologi, maka dapat disimpulkan bahwa Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat (IPLM) adalah ukuran yang digunakan untuk mengevaluasi tingkat literasi masyarakat dalam suatu wilayah atau negara. Indeks ini mencerminkan kemampuan individu dalam membaca, menulis, dan memahami informasi yang diperlukan untuk berpartisipasi aktif dalam kehidupan sehari-hari.

 IPLM mencakup berbagai aspek literasi, seperti literasi tradisional, literasi digital, literasi keuangan, literasi budaya, dan literasi ilmiah. Tujuannya adalah untuk mengukur dan memantau kemajuan dalam meningkatkan tingkat literasi masyarakat serta mengidentifikasi wilayah yang perlu ditingkatkan dalam upaya meningkatkan literasi secara keseluruhan. Dalam konteks pemerintah daerah, IPLM juga mencakup upaya pemerintah dalam membina dan mengembangkan perpustakaan sebagai sarana pembelajaran sepanjang hayat untuk mencapai budaya literasi masyarakat.

 1. Pemerataan Layanan Perpustakaan

Layanan Perpustakaan adalah upaya untuk menyediakan akses yang adil, merata, dan inklusif terhadap layanan perpustakaan bagi seluruh anggota masyarakat yang mencakup aspek; Akses Fisik, Ketersediaan Materi, Program dan Layanan, dan Keterlibatan Komunitas.

2. Ketercukupan Koleksi Perpustakaan

Ketercukupan Koleksi Perpustakaan adalah kondisi di mana sebuah perpustakaan memiliki jumlah dan variasi materi yang mencukupi untuk memenuhi kebutuhan pengguna perpustakaan. sumber daya informasi seperti buku cetak, e-book, jurnal, majalah, materi audiovisual, dan sumber daya elektronik lainnya.

3. Ketercukupan Tenaga Perpustakaan

Tenaga Perpustakaan adalah tenaga kerja yang terlibat dalam pengelolaan, penyediaan, dan penyelenggaraan layanan di perpustakaan. Mereka adalah individu yang memiliki keahlian, pengetahuan, dan keterampilan khusus dalam bidang perpustakaan dan informasi, serta memiliki peran penting dalam memastikan operasional perpustakaan yang efektif dan berkualitas.

4. .Pengunjung perpustakaan

 Pengunjung Perpustakaan merujuk kepada individu atau kelompok yang menggunakan fasilitas perpustakaan untuk mengakses sumber daya informasi dan layanan yang disediakan. Adapun pengguna Pustaka meliputi; siswa, mahasiswa, akademisi, peneliti, profesional, masyarakat umum, dan kelompok khusus seperti anak-anak, remaja, atau lanjut usia.

5. Perpustakaan yang dibina Sesuai SNP Perpustakaan yang dibina sesuai SNP merujuk perpustakaan yang telah dibina sesuai Standar Nasional Perpustakaan dan memiliki Nomor Pokok Perpustakaan (NPP), baik yang telah terakreditasi atau tidak. Standar Nasional Perpustakaan (SNP) adalah seperangkat pedoman, kriteria, dan indikator yang digunakan untuk menilai dan mengukur kualitas dan kelayakan perpustakaan dalam berbagai aspek.

6. Keterlibatan masyarakat dalam kegiatan sosialisasi di perpustakaan.

 Keterlibatan masyarakat dalam kegiatan sosialisasi di bidang perpustakaan merujuk pada partisipasi dan interaksi aktif masyarakat dalam program-program yang diselenggarakan oleh perpustakaan. Program tersebut meliputi; diskusi, lokakarya, pertemuan, pameran, tur perpustakaan, penandatanganan perjanjian kerja sama, dan partisipasi dalam program-program literasi.

7. Perkembangan jumlah anggota perpustakaan di seluruh indonesia

 Perkembangan jumlah anggota perpustakaan di seluruh Indonesia mengacu pada perubahan atau pertumbuhan jumlah individu yang menjadi anggota perpustakaan di berbagai perpustakaan yang ada di seluruh wilayah Indonesia. Anggota perpustakaan adalah individu yang telah mendaftar dan memiliki akses ke layanan perpustakaan, termasuk meminjam buku, mengakses sumber informasi, atau berpartisipasi dalam kegiatan perpustakaan lainnya

1. Tingkatan Skor Indeks Pembangunan Literasi masyarakat.



1. Sinkronisasi Data

Sinkronisasi data yaitu menyelaraskan data yang terdapat pada beberapa sumber, yaitu hasil sensus IPLM 2023 dan pendataan perpusnas sebagai antisipasi terjadinya inkonsistensi ketika data tersebut dipublikasikan kepada pihak yang berwenang ataupun masyarakat Hasil Sinkronisasi yaitu:

a). UPLM 1 menggunakan data yang bersumber dari Pusdatin Perpusnas RI (aplikasi pendataan perpusnas.go.id).

b). UPLM 2, UPLM 4, UPLM 5, UPLM 6 dan UPLM 7 menggunakan data Hasil Sensus IPLM 2023 (Data terakhir Berita Acara Penyampaian Data kepada Dinas Perpustakaan Provinsi)

c) UPLM 3 menggunakan data yang bersumber dari Pusdatin Perpusnas RI (aplikasi pendataan perpusnas.go.id), dan melalui proses cleaning dengan ketentuan data tenaga perpustakaan di Kabupaten/Kota dengan jumlah tenaga perpustakaan lebih dari 4000 orang teridentifikasi sebagai data tidak logis dan perlu perbaikan data. Perbaikan data tidak logis dilakukan dengan cara mengganti data tersebut dengan data jumlah tenaga perpustakaan yang bersumber dari hasil Sensus IPLM 2023.

**BAB III**

**CAPAIAN INDEKS PEMBANGUNAN LITERASI KABUPATEN BULUKUMBA**

**TAHUN 2023.**

Nilai Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat : 86,73 Tinggi, dengan indikator sebagai berikut:

|  |  |
| --- | --- |
| Jumlah Penduduk (BPS 2022) | 443.300 |
| Jumlah Civitas Sekolah (BPS 2022) | 90.619 |
| Jumlah Civitas Akademika(BPS 2022) | 5.127 |
| Jumlah Kelembagaan (BPS 2022) | 738 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **NO** | **INDIKATOR INDEKS PEMBANGUNAN** |  | **NILAI** | **INTERPRETASI** |
| Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat | : | 86,73 |  |
| 1. | Pemerataan Layanan Perpustakaan (UPLM 1) | : | 0,6138 | Pencapaian layanan perpustakaan sebesar 61 persen dari standar |
| 2. | Ketercukupan koleksi perpustakaan (UPLM 2) | : | 0,4571 | Pencapaian koleksi perpustakaan sebesar 46 persen dari standar |
| 3. | Ketercukuoan tenaga perpustakaan (UPLM 3) | : | 1,0000 | Pencapaian tenaga perpustakaan sebesar 100 persen dari standar |
| 4. | Tingkat kunjungan masyarakat perhari (UPLM 4) | : | 1,0000 | Pencapaian tingkat kunjungan masyarakat sebesar 100 persen dari standa |
| 5. | Perpustakaan yang dibina sesuai SNP (UPLM 5) | : | 1,0000 | Pencapaian perpustakaan yang dibina sesuai SNP sebesar 100 persen dari standar |
| 6. | Keterlibatan masyarakat dalam sosialisasi perpustakaan (UPLM 6) | : | 1,0000 | Pencapaian keterlibatan masyarakat sebesar 100 persen dari standar |
| 7. | Anggota perpustakaan (UPLM 7) | : | 1,0000 | Pencapaian jumlah anggota perpustakaan sebesar 100 persen dari standar |
| Keterangan Standar:UPLM1: Jumlah kelembagaanUPLM2: 2 x jumlah pendudukUPLM3: 1 tenaga perpustakaan melayani 2500 pendudukUPLM4: 2% dari jumlah pendudukUPLM5: 22,39% dari jumlah perpustakaanUPLM6: 2% dari jumlah pendudukUPLM7: 2% dari jumlah penduduk |  |  |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **NO** | **INDIKATOR INDEKS PEMBANGUNAN** |  | **NILAI** | **INTERPRETASI** |
| 1. | Pemerataan Layanan Perpustakaan (UPLM1) |  |  |  |
|  | **Jumlah perpustakan** | : | 459 |  |
|  | 1. Rasio ketersediaan perpustakaan umum
 | : | 0,00014 | Terdapat 14 perpustakaan per 100.000 penduduk |
|  | b. Rasio ketersediaan perpustakaan sekolah | : | 0,00426 | Terdapat 426 perpustakaan per 100.000 civitas sekolah |
|  | c. Rasio ketersedian perpustakaan Perguruan tinggi | : | 0,00117 | Terdapat 118 perpustakaan per 100.000 civitas akademika |
|  | d. Kekurangan perpustakaan untuk memenuhi standar | : | 285 | Kekurangan perpustakaan sebanyak 285 unit |
| 2. | Ketercukupan Koleksi Perpustakaan (UPLM2) |  |  |  |
|  | **Jumlah koleksi perpustakaan** | : | 405.268 |  |
|  | a. Rasio ketercukupan koleksi perpustakaan | : | 1:2 | Setiap 1 koleksi dapat diakses oleh 2 penduduk |
|  | b. Kekurangan koleksi perpustakaan untuk memenuhi standar | : | 481.332 | Kekurangan koleksi sebanyak 481.332 judul |
| 3 | Ketercukupan Tenaga Perpustakaan (UPLM3) |  |  |  |
|  | **Jumlah tenaga perpustakaan** | : | 194 |  |
|  | a. Rasio ketercukupan tenaga perpustakaan | : | 1 : 2286 | Setiap 1 tenaga perpustakaan harus melayani 2.286 penduduk |
|  | b. Kekurangan tenaga perpustakaan untuk memenuhi standar | : | 0 | Jumlah tenaga perpustakaan sudah memenuhi standar dan perlu dipertahankan |
| 4 | Tingkat Kunjungan Masyarakat per Hari (UPLM4) |  |  |  |
|  | Jumlah kunjungan masyarakat/har | : | 17.617 |  |
|  | a. Persentase kunjungan masyarakat | : | 3,97% | Persentase jumlah kunjungan per hari dibagi jumlah penduduk sebanyak 3,97 persen, belum ideal |
|  | b. Kekurangan kunjungan masyarakat per hari untuk memenuhi standar | : | 0 | Jumlah pengunjung per hari sudah memenuhi standar dan perlu dipertahankan |
| 5 | Perpustakaan yang dibina Sesuai SNP (UPLM5) |  |  |  |
|  | **Jumlah perpustakaan yang dibina sesuai SNP** | : | 223 |  |
|  | a. Persentase perpustakaan yang dibina sesuai SN | : | 49,23% | Terdapat 49,23 persen perpustakaan yang dibina sesuai SNP |
|  | b. Kekurangan perpustakaan yang dibina sesuai SNP untuk memenuhi standar | : | 0 | Jumlah perpustakaan yang dibina sesuai SNP sudah memenuhi standar dan perlu dipertahankan |
| 6 | Keterlibatan Masyarakat dalam Sosialisasi Perpustakaan (UPLM6) |  |  |  |
|  | **Jumlah keterlibatan masyarakat dalam sosialisasi perpustakaan** | : | 11.327 |  |
|  | a. Tingkat keterlibatan masyarakat dalam sosialisasi & pemanfaatan perpustakaan | : | 2,56% | Terdapat 2,56 persen masyarakat yang terlibat dalam sosialisasi perpustakaan |
|  | b. Kekurangan masyarakat yang terlibat dalam sosialisasi perpustakaan untuk memenuhi standar | : | 0 | Jumlah masyarakat yang terlibat dalam sosialisasi perpustakaan sudah memenuhi standar dan perlu dipertahankan |
| 7. | Anggota Perpustakaan (UPLM7) |  |  |  |
|  | **Jumlah anggota perpustakaan** | : | 98.906 |  |
|  | a. Persentase anggota perpustakaan | : | 22,31% | Terdapat 22,31 persen masyarakat yang menjadi anggota perpustakaan |
|  | b. Kekurangan anggota perpustakaan untuk memenuhi standar | : | 0 | Jumlah anggota perpustakaan sudah memenuhi standar dan perlu dipertahankan |

**BAB IV**

**PENUTUP**

1. Kesimpulan

Pencapaian nilai Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat (IPLM) Kabupaten Bulukumba Tahun 2023 adalah 86,73 masuk dalam kategori tinggi jika dibandingkan dengan Tahun 2022 dimana nilai IPLM Kabupaten Bulukumba adalah 78,82 atau kategori sedang, , Secara umum pencapaian nilai IPLM Provinsi Sulawesi Selatan sebesar 86,74 dan masuk ke dalam kategori Tinggi,

Tahun ini Kabupaten Bulukumba berada pada posisi urutan ke 8 dari 24 Kabupaten Kota. Tiga Kabupaten Kota dengan pencapaian IPLM tertinggi yaitu Kabupaten Sidenreng Rappang 93,69; Kab. Pangkajene Kepulauan 93,66; dan Kab. Kepulauan Selayar 92,63. Sedangkan, tiga Kab/kota yang terendah yaitu Kab. Luwu 60,2; Kab. Wajo 63,43; dan Kab. Gowa 65,12. Urutan pencapaian IPLM Kabupaten/Kota Provinsi Sulawesi Selatan terlampir pada lampiran laporan ini.

1. Saran

Berdasarkan hasil penghitungan Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat Kabupaten Bulukumba Tahun 2023 dengan nilai 86,73 dengan predikat tinggi, maka untuk meningkatkan predikat dari tinggi menjadi sangat tinggi hal hal yang disarankan adalah:

1. Pemerataan Layanan Perpustakaan.

Pemerataan layanan perpustakaan dengan indikator jumlah perpustakaan dalam wilayah Kabupaten Bukukumba yang bersumber dari Pusat Data dan Informasi (Pusdatin) Perpusnas RI (aplikasi pendataan perpusnas.go.id).. Oleh karena itu disarankan untuk memaksimalkan pendataan perpustakaan melalui aplikasi pendataan perpustakaan berbasis wilayah yaitu pendataan berbasis aplikasi untuk menutupi kekurangan jumlah perpustakaan sebanyak 285 unit.

1. Ketercukupan Koleksi Perpustakaan

Terdapat, kekurangan koleksi sebanyak 481.332 judul, disarankan untuk menambahkan jumlah koleksi perpustakaan baik tercetak/elektronik, serta mamaksimalkan pandataan jumlah koleksi perpustakaan sekolah pada semua tingkatan.

1. Komponen Ketercukupan Tenaga Perpustakaan Tingkat Kunjungan Masyarakat perhari, , Perpustakaan yang dibina Sesuai Standar Nasional Perpustakaan (SNP), Keterlibatan Masyarakat dalam Sosialisasi Perpustakaan, Anggota Perpustakaan,

Demikian laporan hasil pengukuran Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat Kabupaten Bulukumba Tahun 2023 dibuat untuk menjadi bahan evaluasi dalam penyelenggaraan kegiatan Tahun 2024.

 Bulukumba,

 KEPALA DINAS

**EMIL YUSRI, SP, MP** Pangkat::Pembina Utama Muda NIP. 19700705 199903 1 005

L

A

M

P

I

R

A

N